**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung pada masa kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil. Kebijakan PIPPK ini tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung. Kebijakan ini dibuat berdasarkan janji politik pada saat Bapak Ridwan Kamil menjadi Calon Walikota Bandung Tahun 2013-2018, yaitu pemberian bantuan Rp. 100.000.000/tahun bagi setiap Rukun Warga (RW), PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Karang Taruna. Ketika Bapak Ridwan Kamil menjadi Walikota Bandung, maka seluruh janji politik pada saat kampanye harus dilaksanakan, sehingga diakomodir dan dimasukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) tentunya memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam bidang pembangunan. Maksud dari program ini adalah untuk meningkatkan tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh *stakeholder* lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat proses dan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam meningkatkan fungsi, kemampuan dan peran kelompok masyarakat di kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan sekaligus melaksanakan proses pembangunan yang inovatif secara mandiri melalui metode pemberdayaan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya dilakukan, namun optimalisasinya sering terhambat oleh beberapa hal seperti jumlah penduduk dan luasnya cakupan pelayanan. Hal ini menimbulkan pelayanan khususnya dibidang pembangunan kurang merata. Sehingga, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bandung membuat suatu kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dilaksanakan di daerah kewilayahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sehingga PIPPK dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memiliki peran penting di daerah, terutama dalam bidang pembangunan. Pentingnya peran kecamatan disebabkan adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kecamatan Coblong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung yang melaksanakan kebijakan PIPPK. Kecamatan Coblong, terdiri atas 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Dago, Kelurahan Sekeloa, Kelurahan Sadang Serang, Kelurahan Lebak Gede, Kelurahan Lebak Siliwangi, dan Kelurahan Cipaganti. Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung, mempertegas mengenai penunjang pelaksana maupun ruang lingkup dari Kebijakan PIPPK tersebut. Penunjang pelaksana kegiatan beserta ruang lingkupnya dapat dilihat dari Tabel 1.1.

1. Penunjang Pelaksana Kegiatan Beserta Ruang Lingkupnya pada Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Penunjang Pelaksana Kegiatan | Ruang Lingkup Kegiatan |
| 1. | Lembaga Rukun Tertangga (RT) / Rukun Warga (RW) | Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan RW, meliputi :1. Infrastruktur
2. Sosial Kemasyarakatan
3. Penguatan Kelembagaan RW
4. Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkup RW
5. Pemberdayaan Dan Inovasi Ekonomi Lokal
 |
| 2. | Lembaga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kelurahan | Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan PKK, meliputi :1. Penguatan Kelembagaan
2. Pelaksanaan Program/Kegiatan Lingkup Pokja I PKK
3. Pelaksanaan Program/Kegiatan Lingkup Pokja II PKK
4. Pelaksanaan Program/Kegiatan Lingkup Pokja III PKK
5. Pelaksanaan Program/Kegiatan Lingkup Pokja IV PKK
 |
| 3. | Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan | Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Karang Taruna, meliputi :1. Penguatan Kelembagaan
2. Penyedian Sarana dan Kelengkapan Kegiatan Olah Raga, dan Kesenian
3. Pengabdian pada Masyarakat
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
5. Pelatihan dalam Rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
 |
| 4. | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan | Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan LPM, meliputi :1. penguatan kelembagaan
2. peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan di kewilayahan
3. koordinasi proses pembangunan.
 |

Sumber : Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.

Penunjang pelaksanaan kegiatan PIPPK yang ada di wilayah Kecamatan Coblong terdiri dari 75 Rukun Warga (RW), 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 6 Karang Taruna dan 6 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Total anggaran PIPPK di Kecamatan Coblong sebesar Rp.9.300.000.000. Sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp.9.092.082.910, dengan kata lain penyerapan anggarannya sebesar 97,76% (Sumber dari Rekapitulasi Realisasi PIPPK Kecamatan Coblong Tahun 2016).

Penyerapan anggaran menjadi salah satu tolok ukur dalam keberhasilan pelaksanaan PIPPK ini. Meskipun penyerapan anggaran secara keseluruhan diatas 95%, namun masih ada di satu kelurahan yang penyerapan anggarannya kurang dari 95% yaitu Kelurahan Dago. Realisasi PIPPK atau penyerapaan anggaran PIPPK Kelurahan Dago sebesar 91% dengan uraian penyerapan anggaran sebagai berikut LPM 68,06%, PKK 96,32%, Karang Taruna 62,52%, dan RW 94,54%. Sehingga pelaksanaan PIPPK khususnya di Kelurahan Dago berdasarkan penyerapan anggarannya dapat dikatakan belum terealisasi sesuai target.

Ruang lingkup pelaksanaan PIPPK juga belum semua terlaksana. Contoh: hampir di semua RW ruang lingkup PIPPK yang dilaksanakan hanya berkisar pada infrastruktur dan pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (Kamtibmas). Sedangkan ruang lingkup lain, seperti pemberdayaan inovasi ekonomi lokal tidak satu pun RW yang melaksanakannya. Ruang lingkup pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP) juga bagi karang taruna belum terlaksana, sehingga PIPPK di Kecamatan Coblong belum terlaksana seluruhnya.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK ini menjadi ciri khas dari kebijakan ini. Masyarakat dituntut untuk ikut berperan dalam membangun daerahnya. Pembangunan ini tidak hanya membangunan infrastruktur saja, melainkan membangun masyarakatnya juga. Hal inilah yang masih belum bisa dilaksanakan oleh para pelaksana.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat penting bagi pelaksanaan PIPPK. Masyarakat dituntut ikut serta secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materi. Hal ini menjadi tantangan maupun permasalahan bagi masyarakat dan juga aparatur pemerintah kewilayahan. Keinginan dan inovasi yang muncul dari masyarakat merupakan tantangan yang harus mampu difasilitasi dan dilaksanakan oleh para pelaksana. Sedangkan permasalahan akan muncul ketika keinginan dan inovasi-inovasi baru dari masyarakat tidak dapat difasilitasi maupun dilaksanakan oleh para pelaksana sehingga menyebabkan masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan PIPPK yang lainnya.

Aparat pemerintah kewilayahan memiiki peran penting dalam pelaksanaan PIPPK. Peran aparat pemerintah diantaranya membina, mengarahkan, dan melakukan pengawasan kepada para pelaksana kegiatan PIPPK. Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat pelaksana PIPPK sangat penting dalam pelakanaan kegiatan. Tidak semua masyarakat (pelaksana kegiatan) tahu mengenai pelaksanaan PIPPK, sehingga aparat pemerintah kewilayahan dituntut untuk membantu dalam memfasilitasi keperluan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan memfasilitasi ini seperti melakukan koordinasi, memberikan pengetahuan dan membantu pada setiap tahapan pelaksanaan PIPPK.

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penjajagan, realisasi PIPPK di Kecamatan Coblong sudah terlaksana, namun masih terdapat beberapa ruang lingkup kegiatan yang belum terlaksana. Kegiatan yang ruang lingkupnya pembangunan masyarakat masih belum sepenuhnya terlaksana. Kurangnya kemampuan SDM atau pelaksana kegiatan menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya beberapa ruang lingkup kegiatan.

Kebenaran hasil penjajagan tersebut tentu harus dikaji dan dibuktikan melalui data empirik hasil penelitian. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan di Kecamatan Coblong Kota Bandung (Studi Kasus: Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan)”

1. **Fokus Penelitian**

Implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Coblong Kota Bandung sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan beberapa hal yang akan dibahas yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Coblong Kota Bandung
2. Apa saja hambatan yang muncul dalam Implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Coblong Kota Bandung
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, yaitu untuk:

1. Mengetahui deskripsi Implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Coblong Kota Bandung
2. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam Implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Coblong Kota Bandung
3. **Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai Implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan literatur untuk semua yang memerlukan teori implementasi kebijakan di lingkungan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan khususnya kecamatan tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Coblong Kota Bandung.

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kecamatan Coblong Kota Bandung yang bertempat di Jalan Sangkuriang Nomor 10a Telepon (022) 2504467 Bandung 40135.

1. **Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan, dimulai dari tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan 24 Juli 2017. Berikut tahapan dalam penyusunan skripsi yang yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jadual Pelaksanaan Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tahun | 2017 |
| Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli |
| Minggu  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tahap Persiapan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | a. Perizinan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | b. Penjajagan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c. Pengajuan Judul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d. Pembuatan Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e. Perbaikan Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Tahap Penelitian |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | a. Observasi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Wawancara |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Tahap Penyusunan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | a. Pengolahan Data |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Analisis Data |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c. Pembuatan Skripsi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d. Perbaikan Skripsi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Tahap Pengujian |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | a. Seminar Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Sidang Skripsi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |